

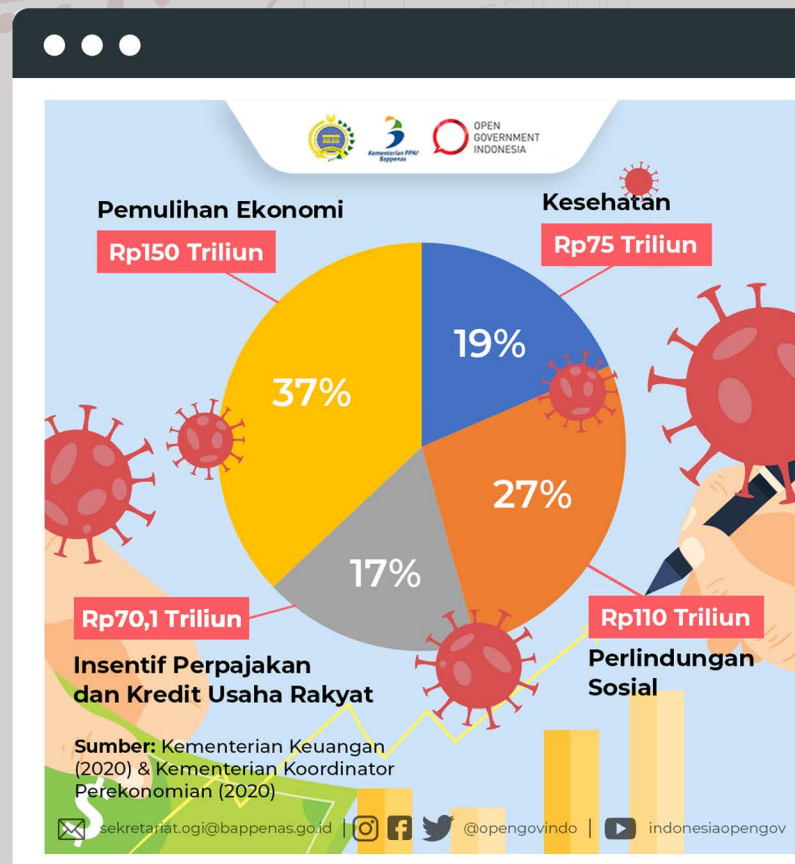
Transparansi Fiskal di Masa Tanggap Darurat Covid-19

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah menelan korban jiwa yang tidak sedikit. Hingga tanggal 17 April 2020, jumlah kasus positif COVID-19 mencapai 2.173.432 jiwa dengan jumlah kematian mencapai 146.291 jiwa di seluruh dunia. Di Indonesia, kasus positif COVID-19 sebanyak 5.923 jiwa dan 520 jiwa dinyatakan meninggal akibat COVID-19. Hal ini menyebabkan dampak yang cukup besar di berbagai aspek, terutama sosial dan ekonomi.

Berdasarkan laporan The Economist Intelligence Unit (EIU), pertumbuhan ekonomi global dipastikan akan mengalami penurunan. Misalnya, perekonomian Republik Rakyat Tiongkok yang diprediksi akan tumbuh sebesar 5,9% sebelum pandemi COVID-19 menurun menjadi 1% sejak pandemi. Hal yang serupa juga dirasakan oleh Amerika Serikat yang diproyeksikan mengalami pertumbuhan ekonomi negatif sebesar -2,9% sejak pandemi COVID-19. Indonesia pun diprediksi akan mengalami dampak yang sama, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan turun hingga 1%.

Ancaman resesi global akibat pandemi COVID-19 mendorong hampir seluruh negara di dunia untuk mengeluarkan kebijakan berupa stimulus fiskal demi menyelamatkan perekonomiannya. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Melalui Perpu tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan tambahan belanja dan pembiayaan anggaran sebesar Rp 405,1 triliun untuk mencegah terjadinya krisis ekonomi dan keuangan akibat pandemi COVID-19.

Kebijakan fiskal terkait dengan anggaran belanja tersebut hendaknya diiringi dengan transparansi fiskal yang baik. Transparansi fiskal diperlukan



Gambar 1. Tambahan Belanja dan Pembiayaan APBN untuk Penanganan Dampak COVID-19
Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

sebagai rekam jejak dan alat ukur pengaruh kebijakan fiskal. Tujuannya adalah untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas kebijakan fiskal. Transparansi fiskal juga dapat mengidentifikasi potensi risiko dan mencegah praktik-praktik korupsi. Terakhir, transparansi fiskal digunakan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil memang bersifat sementara selama masa darurat dan memberi ruang bagi pelibatan publik.

Salah satu negara yang mempunyai program transparansi fiskal yang baik adalah Amerika Serikat. Program transparansi fiskal Amerika Serikat dilaksanakan pada tahun 2009 ketika Amerika Serikat



Gambar 1. Situs Recovery.gov Menampilkan Data Program Penyelamatan Ekonomi Amerika Serikat Tahun 2009-2010

menghadapi krisis keuangan yang hebat. Pada saat itu, Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan *American Recovery and Reinvestment Act (ARRA)*.

Regulasi tersebut tidak hanya mengatur kebijakan terkait program penyelamatan ekonomi tetapi juga langkah untuk membuka data terkait penggunaan anggaran. Melalui ARRA, Pemerintah Amerika Serikat didorong untuk membuka data program penyelamatan ekonomi melalui kanal web di internet, yang kemudian bernama Recovery.gov. Situs tersebut menampilkan data secara berkala mengenai pengadaan barang dan jasa, pengeluaran anggaran negara, kondisi lapangan pekerjaan, dan status proyek pemerintah.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendorong transparansi fiskal di masa tanggap darurat COVID-19. Pertama, pemerintah harus dapat memahami siapa yang membutuhkan data fiskal. Setidaknya terdapat beberapa pihak yang membutuhkan data transparansi fiskal yakni institusi yang menangani pandemi COVID-19 (instansi pemerintah dan lembaga keuangan internasional), individu/keluarga/bisnis yang terdampak COVID-19, aktor eksternal (investor dan lembaga pemeringkat kredit), dan aktor yang mengawasi pemerintah (lembaga audit dan organisasi masyarakat sipil).

Kedua, pemerintah harus mengenali ketersediaan dan kebutuhan data atau informasi apa saja yang harus dibuka. Misalnya, apakah data terkait realokasi anggaran di setiap institusi pemerintah sudah tersedia hingga ke tingkat kegiatan. Hal ini juga akan membantu pemerintah untuk memetakan realokasi anggaran. Selain itu, identifikasi ketersediaan dan kebutuhan data juga membantu pemerintah untuk membuat kebijakan yang efektif. Sebagai contoh, data kebutuhan anggaran tertentu dapat mendorong pemerintah untuk menelaah kembali alternatif pembiayaan dari donor atau lembaga keuangan internasional lainnya.

Terakhir, semua data dan informasi dalam transparansi fiskal harus dipublikasikan dengan baik agar dapat berguna. Informasi dapat dipublikasikan dalam bentuk laporan keuangan atau siaran pers. Amerika Serikat dan Meksiko memilih menggunakan platform digital untuk mempublikasikan informasi keuangan yang dianggap penting untuk diketahui. Selain itu, pemerintah dapat menyediakan mekanisme pelibatan publik baik dalam bentuk formal maupun informal sesuai dengan tingkat kedaruratan yang dihadapi.